

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan perlakuan yang setara merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah. Presiden Jokowi berusaha keras menunjukkan bahwa pemerintahan dibawah pimpinannya terbuka, jujur dan berkualitas. Indonesia adalah Pemerintahan yang demokratis sebagai negara yang terbuka dalam pengelolaan keuangan negara kepada publik.

Oleh karena itu diperlukan *Good Corporate Governancedalam* pengelolaan keuangan negara. Agar pengelolaan keuangan akuntabel dibutuhkan keterbukaan (transparansi) dan kewajaran. Serta dalam pelaporan keuangan diperlukan tanggung jawab dari masyarakat. Pemerintah juga harus bersikap independen dalam mengelola keuangan. Hal ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintah yang bersih dari Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN).

Menurut Sukrisno Agoes (2009), **“Pada intinya, timbulnya krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh tata keola pemerintahan (*bad***

government governance) sehingga memberi peluang yang besar timbulnya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)¹.

Dan sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, maka Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menjadi salah satu pihak eksternal yang berperan besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Ketertiban dalam penggunaan uang pemerintah dan basis dari perbaikan yang disebut dengan istilah *good governance* tidak akan berhasil, jika laporan keuangan tidak memenuhi kualitas. Dengan demikian, laporan keuangan yang berkualitas merupakan syarat mutlak untuk mencapai predikat *good governance*. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) adalah merupakan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, responsibel, independen, dan setara.

Pelaporan keuangan menjadi wahana bagi perusahaan maupun pemerintah untuk mengkomunikasikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai sumberdaya yang dimiliki serta kinerja kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan atas informasi tersebut. Informasi akan mempunyai manfaat jika disampaikan tepat waktu kepada para pemakainya guna pengambilan keputusan. Nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan determinan penting bagi tingkat kemanfaatan laporan tersebut.

¹Sukrisno Agoes et,al., **Etika Bisnis dan Profesi**, Edisi Revisi: Salemba Empat. Jakarta. 2009. Hal. 99.

Maka dalam melakukan penyusunan laporan keuangan harus memahami konsep penyusunan laporan keuangan dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan benar dan tepat. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan aturan-aturan dan standar-standar yang dipakai dalam SAP akan berdampak pada opini yang diberikan auditor (dalam hal ini BPK) terhadap laporan keuangan yang disajikan.

. Tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip tersebut, akan tercermin dari kurang tersedianya informasi untuk melaksanakan analisis risiko atau hasil investasi yang berlebihan pada sumber daya yang tidak produktif yang pada akhirnya menurun atau pudarnya kepercayaan pemerintah pusat. Masyarakat selalu menuntut adanya transparansi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Agar laporan keuangan berkualitas, maka penerapan Good Corporate Governance harus benar-benar diperhatikan. Dalam mengembangkan GCG lembaga ini dilandasi oleh pemikiran pentingnya mengetahui sejauh mana organisasi publik telah menerapkan prinsip GCG dan keikutsertaannya dalam program ini secara sukarela.

Sebagai acuan penelitian ini adalah skripsi Ninna Rosalin Siahaan, sehubungan dengan opini auditor terhadap laporan keuangan dalam hal rendahnya akuntabilitas dan transparansi seperti menjadi masalah yang serius bagi pemerintah kabupaten deli serdang karena pada tahun 2014 memperoleh opini audit dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai berikut : Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ini sudah mengalami peningkatan karena

pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 opini auditor yaitu Tidak Memberikan Pendapat, dan diharapkan pada tahun 2015 laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan mendapatkan opini dari auditor adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Namun dalam prakteknya, implementasi SAP di lingkungan pemerintah tidaklah mudah. Selain kesiapan pemerintah daerah yang masih kurang, juga disebabkan adanya peraturan di tingkat operasional, dan rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut akan mengakibatkan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah daerah sudah pasti tidak menggambarkan posisi keuangan serta hak dan kewajiban yang wajar. Disisi lain, setiap kepala pemerintahan mengupayakan pencapaian laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga, penting untuk diuji kembali sejauh mana kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Pada sektor Pemerintahan, pemerintah Daerah tidak menerapkan prinsip Independensi termasuk Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ini bekerja dibawah komando dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dibawah tekanan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebagai pihak intenal dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai pihak eksternal, dan terikat peraturan tentang pengelolaan keuangan. Namun dalam Prinsip Independensi menjelaskan bahwa indikator yang dikatakan independensi adalah organisasi yang mampu mandiri dan bebas dari tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Peneliti ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Ninna Rosalin Siahaan pada tahun 2016. Faktor yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel yang peneliti adalah keempat prinsip *Good Corporate Governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, dan perlakuan yang setara, sementara penelitian sebelumnya hanya 2 prinsip yang diuji yaitu prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan kajian atas teori dan penelitian terdahulu, maka penulis terinspirasi untuk meneliti tentang implementasi GCG kaitannya dengan kualitas Laporan Keuangan dengan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka secara spesifik masalah penelitian ini dapat dirumuskan dengan kalimat pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang?
2. Apakah transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang?

3. Apakah tanggungjawab berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang?
4. Apakah perlakuan setara (*fairness*) berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang?
5. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi akuntabilitas terhadap kualitas Laporan Keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi transparansi terhadap kualitas Laporan Keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi tanggungjawab terhadap kualitas Laporan Keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi perlakuan setara (*fairness*) terhadap kualitas Laporan Keuangan.

5. Untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi *Good Corporate Governanc* terhadap kualitas Laporan Keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Deli Serdang, yaitu penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur yang dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governanc* terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
2. Bagi akademisi, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dalam pengembangan ilmu akuntansi berkaitan dengan pengaruh *Good Corporate Governanc* terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Kedepannya diharapkan menjadi acuan bagi peneliti berikutnya, dalam rangka pengembangan ilmu mengenai topik ini.
3. Bagi peneliti, yaitu penelitian ini merupakan sarana untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh *Good Corporate Governanc* terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Bab II

LANDASAN TEORI

2.1 *Good Corporate Governance*

Mulai populernya istilah “tata kelola perusahaan yang baik” atau yang lebih dikenal sebagai *good corporate governance* (GCG) yang tidak dapat dilepaskan dari maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan besar, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika Serikat. Untuk mengatasinya, pemerintah AS bertindak cepas untuk meredam kepanikan para investor dengan mengeluarkan UU. UU ini menerangkan penataan kembali akuntansi Perusahaan Publik, tata kelola perusahaan, dan perlindungan terhadap investor. Oleh karena itu, UU ini menjadi acuan awal dalam menjabarkan dan menegakkan GCG, baik di AS maupun di Indonesia.

2.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Menurut Sukrisno Agoes et.al. (2009), **Walaupun istilah GCG dewasa ini sangat populer, namun sampai saat ini belum ada definisi baku yang dapat disepakati oleh semua pihak. Istilah “Corporate Governance” pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee, Inggris tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report.²**

Sehingga banyak ahli mengemukakan pendapatnya mengenai definisi pasti *Good Corporate governance*. Dalam Pirma Sibarani et.al. :

World Bank lebih menekankan pada cara Pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara.³

²Ibid. Hal. 101

³Pirma Sibarani et.al., **Akuntansi Pemerintahan**. Politeknik Negeri Medan. Medan. 2011. Hal. 4

Menurut Peraturan Bank Indonesia, GCG adalah **suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*).**⁴

Good Governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Lembaga tersebut seperti yang dikemukakan oleh Hamdani (2016) adalah sebagai berikut :

- a. **Patriadi, Pandu (2004) Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (consistent law enforcement). Peran negara sangat menentukan keberhasilan GCG. Oleh karenanya negara mempunyai peran strategis dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih. Negara yang tidak menyelenggarakan prinsip-prinsip GCG akan memiliki kredibilitas yang rendah, kinerja yang rendah, korupsi yang merajalela serta tidak terciptanya kepastian hukum.**
- b. **Komisi Pemberantasan Korupsi (2007), Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. GCG menjadi sebuah keniscayaan, mengingat kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh organ-organ perusahaan (RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi) harus dilakukan dalam kerangka pemenuhan hak dan tanggung jawab seluruh pemegang saham, termasuk para pemegang saham minoritas yang notabene dikuasai oleh publik, atas dasar kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan**
- c. **Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara objektif dan bertanggung jawab**⁵.

Secara sederhana *Corporate governance* merupakan tata kelola yang berhubungan dengan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dan dari semua hal tersebut, kunci dalam memahami *Good Governance* adalah pemahaman atas

⁴Hamdani., **Good Corporate Governance: Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016. Hal. 22

⁵ **Ibid.** Hal. 25.

prinsip-prinsip yang mendasarinya, berdasarkan dari prinsip-prinsip ini didapat tolok ukur kinerja suatu instansi pemerintahan.

2.1.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Dalam prakteknya *Good Government Governance* memiliki beberapa prinsip, adapun prinsip-prinsip *Good Government Governance* adalah sebagai berikut :

2.1.2.1 Akuntabilitas

Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Azas akuntabilitas menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara.

Pengertian akuntabilitas menurut Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010:

“Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

Menurut Mardiasmo : **“Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”**.⁶

Menurut Mardiasmo akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu :

⁶Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Keempat, ANDI, Yogyakarta, 2009, hal. 20

- a. **Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)**
Horizontal Accountability adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
- b. **Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)**
Vertical Accountability adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan selanjutnya pemerintah pusat kepada MPR.⁷

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publi

k. Tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga-

lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Akuntabilitas publik harus dilakukan oleh organisasi sektor publik yang terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood

dalam buku Mardiasmo menjelaskan empat dimensi akuntabilitas, yaitu:

1. **Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum**
 2. **Akuntabilitas Proses**
 3. **Akuntabilitas Program**
 4. **Akuntabilitas Kebijakan**
1. **Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum**
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dan publik.
 2. **Akuntabilitas Proses**
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal ke-cukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas

⁷Ibid, hal. 21

proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban Pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.⁸

Ciri-ciri pemerintahan yang akuntabel yaitu :

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja (performance) pemerintah.

Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat

⁸Ibid., Hal. 22

tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh *agent* yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi.

2.1.2.2 Transparansi

Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Pemerintahan yang demokratis menuntut adanya keterbukaan dari pengelola keuangan negara kepada publik. Oleh karena itu diperlukan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Agar pengelolaan keuangan negara akuntabel dibutuhkan keterbukaan (transparansi). Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak

yang berkepentingan, informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

National Committee on Governance “ **Prinsip transparansi (disebut juga prinsip keterbukaan), artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi**”.⁹

Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah, beserta keputusan-keputusannya. Transparansi memungkinkan semua *stakeholder* dapat mengetahui struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya, serta laporan pertanggungjawaban tahun lalu.

Transparansi merupakan prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Dengan adanya transparansi pemerintah yang ditunjang dengan hukumnya yang jelas, akan menambah wawasan dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Meningkatnya kepercayaan terhadap pemerintahan, maka akan menjamin meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam

⁹Sukrino Agoeset, al., **Op.Cit.**, Hal.104

pembangunan daerahnya dan akan dapat meminimalisir berkurangnya penyimpangan atau penyelenggaraan dalam pengelolaan pemerintah.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif, terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Adapun dimensi transparansi yang telah dijelaskan terbagi dua yaitu :

1. Terdapat komunikasi publik oleh pemerintah berupa laporan keuangan yang mudah diakses dan terbukanya informasi mengenai proses.
2. Aksesibilitas masyarakat terhadap transparansi dalam pembuatan laporan keuangan berupa sistem pemberian informasi kepada publik.

Transparansi merupakan syarat agar pengelolaan keuangan dapat dikatakan akuntabel. Bentuknya berupa keterbukaan pemerintah daerah atas aktivitas sumber daya publik terhadap transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami.

2.1.2.3 Responsibilitas (*responsiveness*)

Responsibilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban dari sisi yang menerima pelayanan (masyarakat). Pemerintah dapat dikatakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, apabila kebutuhan masyarakat tersebut teridentifikasi oleh para pembuat kebijakan dengan pengetahuan lokal yang tepat dan dapat menjawab apa yang menjadi kepentingan lokal. Birokrasi publik dapat dikatakan bertanggung jawab jika merasa dinilai mempunyai responsibilitas yang tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, keluhan, aspirasi masyarakat yang diembannya.

Menurut Sukrisno Agoes ada 5 dimensi Responsibilitas yaitu:

1. **Dimensi Ekonomi, artinya tanggung jawab pengelolaan diwujudkan dalam bentuk pemberian keuntungan ekonomis bagi para pemangku kepentingan**
2. **Dimensi Hukum, artinya tanggungjawab pengelolaan diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; sejauh mana tindakan manajemen telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku**
3. **Dimensi Moral, artinya sejauh mana wujud tanggung jawab tindakan manajerial tersebut dirasakan keadilannya bagi semua pemangku kepentingan**
4. **Dimensi Sosial, artinya sejauh mana manajemen telah menjalankan corporate social responsibility (CSR) sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam dilingkungan perusahaan**
5. **Dimensi spiritual, artinya sejauh mana tindakan manajemen telah mampu mewujudkan aktualisasi diri atau telah dirasakan sebagai bagian dari ibadah sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya¹⁰**

Berdasarkan pernyataan tersebut disebutlah bahwa responsibilitas mengacu kepada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsibilitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator *Good Governance* karena responsibilitas secara langsung menggambarkan kemampuan suatu organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Responsibilitas yang sangat rendah diperlihatkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini sangat jelas memperlihatkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

¹⁰Ibid. Hal.104

Organisasi yang memiliki tingkat responsibilitas yang rendah dengan sendirinya akan memiliki kinerja yang rendah.

Namun dalam prakteknya, prinsip responsibilitas pun ada dimensi yang tidak diterapkan pada Pemerintahan, yaitu Dimensi Ekonomi. Dimensi Ekonomi menjelaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan diwujudkan dalam bentuk pemberian keuntungan ekonomis pada para pemangku kepentingan. Dalam Pemerintahan tidak ada yang namanya pembagian keuntungan kepada para pemangku kepentingan. Keuntungan dan para pemangku kepentingan hanya ada di sektor swasta.

2.1.2.4 Perlakuan yang Setara

Dalam pemerintahan, semua warga negara mempunyai kesempatan atau hak untuk meningkatkan ataupun menjaga kesejahteraan mereka dengan terlibat dalam pemerintahan. Kesetaraan pada umumnya relatif sulit diperoleh, untuk memperoleh keadilan biasanya diperlukan pihak ketiga sebagai penegak, dengan harapan pihak tersebut dapat bertindak adil terhadap pokok-pokok yang ada selisih. Oleh karena itu, pihak ketiga tersebut haruslah netral, tidak boleh menguntungkan salah satu pihak saja.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip kewajaran adalah :

1. Adanya kejelasan keseimbangan antara hak dan kewajiban, tanggungjawab dan wewenang yang dapat diterima oleh semua pihak terkait.

2. Adanya hak mendapatkan informasi yang relevan bagi pihak berkepentingan
3. Adanya saluran bagi pihak berkepentingan untuk memberikan pendapatnya.

Kesetaraan adalah pengakuan dan pelakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Kesetaraan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Atau dengan kata lain, kesetaraan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi hak nya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Pelaksanaan jaminan hukum sangat dituntut dalam penyelenggaraan pemerintahan negara (pemerintah dan pejabat publik) yang bersih, baik, dan transparan.

Agar prinsip ini dapat terwujud, perlu diatur dengan tertulis dan tegas hak-hak dan kewajiban setiap pihak, bagaimana mekanisme hubungan antar mereka dan apa yang perlu dilakukan bila ada pihak yang dirugikan atau tidak cukup puas. Karenanya, pengaturan ini perlu mencakup tindakan sanksi serta tindakan hukum bila terdapat pihak yang melakukan penyimpangan, termasuk pengaturan agar tidak ada pihak-pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat dari perbuatan pihak lainnya.

2.1.2.5 Independensi (Kemandirian)

Independensi (Kemandirian) adalah suatu keadaan dimana organisasi bebas dari pengaruh-pengaruh perusahaan lain serta tekanan-tekanan dari pihak lainnya yang tidak sesuai dengan mekanisme.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan independensi adalah :

1. Komitmen Pemerintahan Daerah

Adanya komitmen yang kuat dari setiap individu untuk bertindak secara independen, bebas tanpa pengaruh tekanan dari pihak manapun

2. Benturan kepentingan

Adanya benturan kepentingan dengan pihak-pihak tertentu dapat menjadikan masing-masing pihak tidak independen antara satu pihak dengan pihak lainnya, misalnya adanya hubungan kekeluargaan dengan pemasok tertentu.

Akan tetapi pada sektor Pemerintahan, pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang tidak menerapkan prinsip Independensi. Prinsip Independensi atau yang sering disebut prinsip kemandirian tidak diterapkan pada Pemerintah termasuk Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ini bekerja dibawah komando dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dibawah tekanan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebagai pihak intenal dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai pihak eksternal, dan terikat peraturan tentang pengelolaan keuangan. Namun dalam Prinsip Independensi menjelaskan bahwa indikator yang dikatakan independensi adalah organisasi yang mampu mandiri dan bebas dari tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme.

Prinsip-prinsip diatas merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam hal pelaksanaan *Good Government Governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik.

Penerapan *Good Government Governance* dalam pemerintahan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Disini juga dapat disimpulkan arah kedepan *Good Government Governance* adalah pemerintahan yang sangat profesional, yang bekerja untuk melihat dan memperbaiki serta memenuhi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu tentu pemerintahan harus dikelola oleh manusia yang memiliki kualifikasi profesional dan SDM yang memiliki kemampuan baik dengan memiliki responsivitas, responbilitas, dan akuntabilitas.

Maka dari semua hal diatas, dapat disimpulkan manfaat dari penerapan *Good Government Governance* yaitu meningkatkan pelayanan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan cara menciptakan sistem kelembagaan dan pelaksanaan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel.

Penerapan prinsip kewajaran, keterbukaan, akuntabilitas dan responsibilitas didalam Pemerintah, seharusnya dijadikan sebagai pedoman ataupun acuan para pejabat Pusat dan Daerah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Pemerintah yang telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik akan mampu memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap segala aktivitas pelayanan masyarakat yang dijalankannya. Dengan menerapkan GCG, Pemerintah Pusat maupun Daerah akan melakukan pelayanan masyarakat dengan maksimal dan mampu membangun perekonomian Indonesia jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Kualitas Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 pragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan”.¹¹

Menurut Hery mengatakan bahwa

Laporan Keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.¹²

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan menjadi alokasi sumber daya.

Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak berkepentingan, yang

¹¹PP.71, **Op.Cit.**, Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 7, Pragraf 24

¹²Hery, 2013. **Teori Akuntansi: Suatu Pengantar**, Lembaga Penerbit: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. 2013. Hal.7.

menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang telah dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Laporan keuangan yang berkualitas juga adalah laporan keuangan yang handal, relevan, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, Laporan keuangan pemerintah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Defenisi kualitas menurut Iman Mulyana yang dikutip oleh Ninna Srosalin Siahaan adalah **“Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidakesesuaian, sertadicapai melalui pemeriksaan”**¹³ Berdasarkan pengertian tersebut bahwa, kualitas merupakan suatu penilaian terhadap *output* pusat pertanggungjawaban atau suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang, maupun segi yang tidak berwujud seperti suatu kegiatan. Beberapa kualitas penting informasi yang terkandung dalam laporan keuangan menurut SAP yaitu **“dapat dipahami (*understandbility*), relevansi**

¹³ Ninna Rosalin Siahaan. Skripsi: **Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pinrang)**, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2016, Hal. 16

(relevance), keandalan (reliable), dan dapat diperbandingkan (comparibilt)”.¹⁴ Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Untuk itu pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta keuangan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menetapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan Laporan Keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian Laporan dengan standar yang ditetapkan Pemerintah

2. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal akuntansi Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap nilai Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang dinyatakan dengan ketepatanwaktuan dan keterandalan.

¹⁴PP.71, **Op.Cit.**,Lampiran I.01 KerangkaKonseptual - 7, Paragraf33

2.2.2 Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat karakteristik yaitu: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, Dapat dipahami. Karakteristik kualitatif keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia melalui PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No 1 (2015 : 5) adalah :

a. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan (*predictive value*), dan menegaskan dan mengoreksi hasil evaluasi mereka (*feedback value*). Selain itu, suatu informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dari kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Tetapi pada hakikatnya ada penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pelaporan lain pada umumnya.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Sehubungan dengan hal ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2.3 Komponen-komponen Laporan Keuangan.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa komponen laporan keuangan meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010 menyatakan bahwa :

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.¹⁵

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya

¹⁵ PP.71, **Op.Cit.**, Lampiran I.03 PSAP 02 - 4, Paragraf 8

yang menambahkan Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- (b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak dapat diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- (c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- (d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defenisi atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembiayaan kembali pokok pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas dana, Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- (c) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu periode pelaporan. Dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, sebab, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- (b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- (c) Transfer adalah hak pemerintah atas kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- (d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas.

Menurut Abdul Halim, **Laporan arus kas adalah laporan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.**¹⁶

¹⁶ Abdul Halim et.al., **Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah**, Salemba Empat : Edisi 3. Jakarta.2007. Hal.90

Laporan kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara atau Daerah.
- (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara atau Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut Indra Bastian, **Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.**¹⁷

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAI, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Menurut

¹⁷Indra Bastian, **Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar**, Edisi Ketiga, Erlangga, Jakarta, 2013, Hal Hal.300

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- (b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut terkendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- (d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- (e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar laporan keuangan;
- (f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- (g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.¹⁸

2.2.4 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan sektor publik, berbeda dengan sektor swasta. Laporan keuangan sektor swasta mempunyai tujuan untuk mengukur laba, sedangkan tujuan laporan keuangan sektor publik sebagai informasi yang dapat membantu para penggunanya untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta mengadakan evaluasi atas penggunaan sumber-sumber oleh pemerintah. Pengguna laporan keuangan juga memberi perhatian terhadap neraca-neraca tersebut, termasuk kinerja pemerintah dan kondisi keuangan.

Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 menjelaskan bahwa: **Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan**

¹⁸PP.71, Op.Cit., Lampiran I.03 PSAP 02 - 4, Paragraf 8

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.¹⁹

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

¹⁹PP.71, **Op.Cit.**, Lampiran I.03 PSAP 02 - 4, Paragraf 9

Menurut Indra Bastian (2010) :

Secara spesifik, tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas asumsi sumber daya yang dipercayakan.²⁰

Menurut Winwin Yadiati (2007) :

Sementara itu, bagi organisasi nirlaba (nonbisnis) tujuan pelaporan keuangan akan berbeda dengan pelaporan keuangan untuk perusahaan bisnis. Perbedaan tujuan tersebut dikarenakan karakteristik organisasi yang berbeda.²¹

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi, dari semua kelompok pengguna. Para pengguna laporan keuangan pemerintah daerah yang utama adalah DPRD, masyarakat pembayar pajak, masyarakat pemilih, pemasok, pihak kreditur, donatur, pemerintah pusat, para pemerhati daerah, selain para pimpinan dan pelaksanaan manajemen pemerintah daerah sendiri yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan yang relevan. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah yaitu :

1. Masyarakat;
2. Para wakil rakyat dan lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa;
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan
4. Pemerintah

²⁰Indra Bastian, **Op.Cit.**, Hal.297

²¹Winwin Yadiati, **Teori Akuntansi : Suatu Pengantar**, Kencana, Jakarta, 2007, Hal Hal.54

2.2.5 Prinsip-Prinsip Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan dimaksudkan agar sebagai ketentuan yang dipahami dan ditata oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah: Basis Akuntansi, Prinsip Nilai Historis, Prinsip Realisasi, Prinsip Subtansi, Mengungguli Bentuk Formal, Prinsip Realisasi, Prinsip Konsistensi, Prinsip Pengungkapan Lengkap, dan Prinsip Penyajian Wajar.

Penjelasan dari 8 (delapan) prinsip tersebut yaitu:

a. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikan laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajiakan laporan demikian.

b. Prinsip Nilai Historis

Nilai Historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.

Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah dan mengurangi kas.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya. Maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas

Kegiatan akuntansi dalam pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode dan semesteran juga dianjurkan.

f. Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode

akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan atau Catatan Atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

2.3 Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan sesuai informasi mengenai kinerja pemerintah secara akurat, tepat waktu, dan transparan. Artinya,

pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menginformasikan semua apa yang telah dilakukan dan dicapai perusahaan selama satu periode tertentu (*responsibility*). Apa yang diinformasikan pemerintah kepada publik harus dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keakuratannya, serta tidak ada sesuatu yang disembunyikan dari publik (*accountability*). Transparansi laporan keuangan diperlukan untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Kualitas laporan keuangan sebuah pemerintah tergantung dari seberapa besar informasi yang disajikan pemerintah bisa berguna bagi pengguna dan bagaimana pemerintah menyusun laporan keuangan yang ada berdasarkan kerangka konseptual dan prinsip-prinsip dasar dan tujuan akuntansi. Baik buruknya kualitas Laporan Keuangan dapat dilihat dari sehat atau tidak sehatnya pemerintahan tersebut. Pemerintahan yang sehat akan memiliki laporan keuangan yang berkualitas baik tanpa adanya penyimpangan. Laporan keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur atau menentukan sejauhmana kualitas pemerintahan. Dari laporan keuangan tersebut, dapat diketahui keadaan finansial dan hasil-hasil yang telah dicapai pemerintah selama periode tertentu. Maka dari itu, untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas baik, Pemerintahan diharuskan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam menjalankan kegiatannya.

Upaya menerapkan prinsip *good corporate governance* membuat sebuah pemerintah akan mempunyai BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai pihak eksternal yang melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan keadilan, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas. Keempat prinsip inilah yang membuat laporan keuangan sebuah pemerintah menjadi lebih berkualitas. Dari pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa dengan diterapkannya *corporate governance* akan membuat kinerja suatu pemerintah lebih baik, karena adanya sistem pengawasan yang akan mengurangi penyimpangan sehingga akan membuat laporan keuangan berkualitas. Pemerintah membutuhkan tata kelola yang baik untuk tetap mempertahankan nilai-nilai yang dianut secara organisasional. Semakin tinggi tingkat implementasi GCG, semakin tinggi pula kualitas Laporan Keuangan yang ditampilkan. Laporan keuangan yang berkualitas dinilai dengan seberapa baik angka-angka dalam laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan.

2.4 Tinjauan Empirik (Penelitian Terdahulu)

Dalam penelitian Sri Ayu Wulandari Aswadi pada tahun 2014 melakukan penelitian tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi Kasus di Pemerintahan Kabupaten Pinrang dengan hasil menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dengan melakukan penelitian di 32 SKPD pada pemerintah kabupaten Pinrang dengan jumlah responden sebanyak 70 orang.

Dalam penelitian Ninna Rosalin Siahaan pada tahun 2016 melakukan penelitian tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi Kasus di Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dengan hasil menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dengan melakukan penelitian di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah responden sebanyak 30 orang.

Dalam penelitian Joni Franssiscus Malau pada tahun 2016 melakukan penelitian tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi Kasus di Pemerintahan Kabupaten Karo dengan hasil menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dengan melakukan penelitian di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo dengan jumlah responden sebanyak 30 orang.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun	Judul	Variabel	Hasil
	Peneliti	Penelitian	Penelitian	Penelitian
Sri Ayu Wulandari Aswadi	2014	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten	Variabel Independennya adalah Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2), sedangkan Variabel Dependennya	Pengaruh Akuntabilitas dan transparansi Berpengaruh Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

		Pinrang	adalah kualitas laporan keuangan(Y)	
Ninna Rosalin Siahaan	2016	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Variabel Independennya adalah Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2), sedangkan variabel Dependennya adalah kualitas laporan keuangan (Y)	Pengaruh Akuntabilitas dan transparansi Berpengaruh Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Joni Franssiscus Malau	2016	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo	Variabel Independennya adalah Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2), sedangkan variabel Dependennya adalah kualitas laporan keuangan (Y)	Pengaruh Akuntabilitas dan transparansi Berpengaruh Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2.5 Paradigma Penelitian

Perhatian Masyarakat luas terhadap isu GCG pada keuangan publik di Indonesia semakin meningkat yang disebabkan oleh salah satu faktor yang desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Untuk dapat melihat kualitas laporan keuangan pemerintah tersebut dapat melihatnya dengan cara pengaruhnya pada *Good Corporate Governance* laporan keuangan tersebut. Prinsip GCG pada

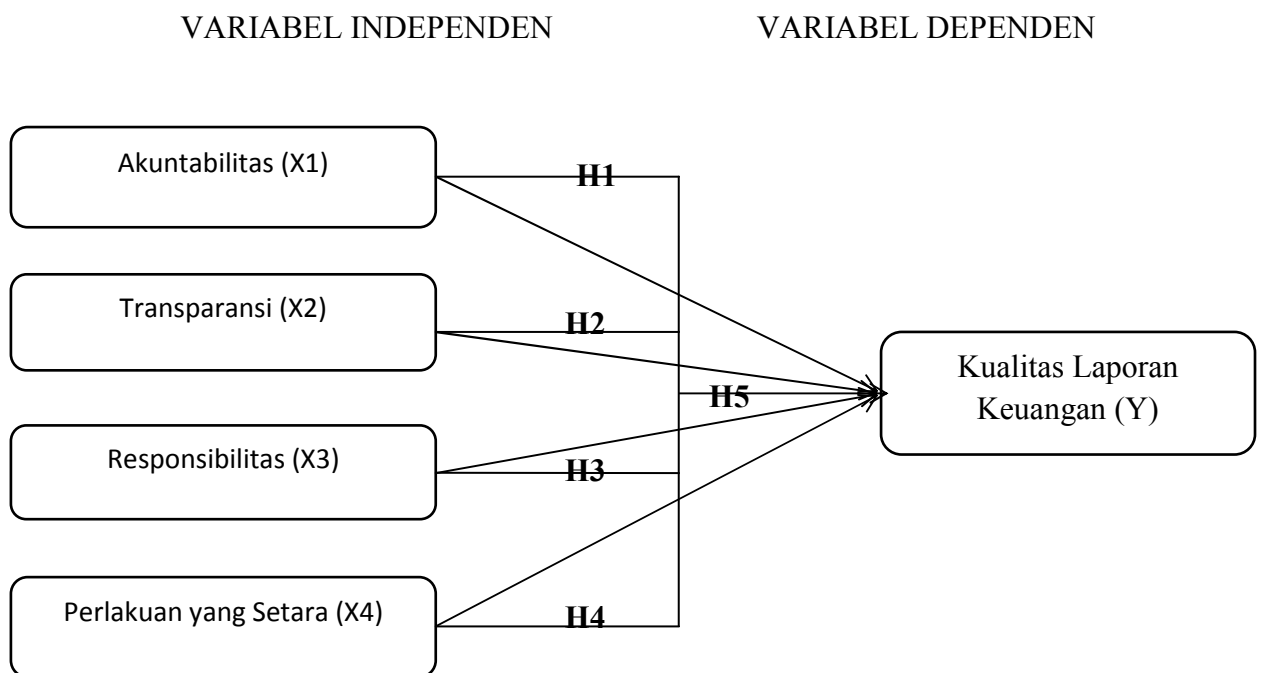
umumnya ada 5, yaitu akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi dan perlakuan yang setara.

Akan tetapi pada sektor Pemerintahan, pemerintah Daerah tidak menerapkan prinsip Independensi termasuk Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ini bekerja dibawah komando dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dibawah tekanan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebagai pihak intenal dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai pihak eksternal, dan terikat peraturan tentang pengelolaan keuangan. Namun dalam Prinsip Independensi menjelaskan bahwa indikator yang dikatakan independensi adalah organisasi yang mampu mandiri dan bebas dari tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme.

Tidak hanya pada prinsip Independensi yang bertentangan dalam sistem Pemerintahan. Dalam prinsip Responsibilitas pun ada dimensi yang tidak diterapkan pada Pemerintahan, yaitu Dimensi Ekonomi. Dimensi Ekonomi menjelaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan diwujudkan dalam bentuk pemberian keuntungan ekonomis pada para pemangku kepentingan. Dalam Pemerintahan tidak ada yang namanya pembagian keuntungan kepada para pemangku kepentingan. Keuntungan dan para pemangku kepentingan hanya ada di sektor swasta.

Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk menghentikan penelitian yang berfokus pada prinsip independensi dan dimensi ekonomi dalam prinsip responsibilitas pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Peneliti hanya melakukan penelitian pada ke-4 prinsip GCG yang lainnya.

Berdasarkan paparan singkat tersebut, maka kerangka pemikiran penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.6 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.6.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program. Akuntabilitas publik mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat atau pemerhati independen yang memiliki

hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan yang tersedia sesuai dengan permintaan tingkat tinggi pemerintah. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ninna Rosalin Siahaan pada tahun 2016 dengan hasil penelitian transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Maka dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis yaitu :

H₁ : Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.6.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Transparansi laporan keuangan diperlukan untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ninna Rosalin Siahaan pada tahun 2016 dengan hasil penelitian transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Maka dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis yaitu :

H₂ : Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.6.3 Pengaruh Responsibilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Responsibilitas laporan keuangan diperlukan untuk memberikan informasi keuangan mengenai program CSR dan kegiatan pelayanan yang

tertuang didalam Laporan Keuangan berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan pelayanan masyarakat yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Maka dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis yaitu :

H₃ : Responsibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.6.4 Pengaruh Perlakuan yang Setara (Fairness) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Perlakuan yang setara (*Fairness*) dalam laporan keuangan diperlukan untuk memberikan informasi keuangan yang menguntungkan setiap elemen masyarakat dan bertindak adil dan memberikan informasi yang relevan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Perundang-undangan menuntut pemerintahan negara untuk menegakkan hak yang sama bagi setiap elemen masyarakat dalam hal bersih, baik dan transparannya laporan keuangan daerah.

Maka dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis yaitu :

H₄ : Perlakuan yang setara (*Fairness*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.6.5 Pengaruh simultan Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Di pemerintahan, laporan keuangan yang berkualitas adalah akurat, dapat dipertanggung jawabkan, memberikan informasi pelayanan masyarakat dan berlaku adil pada setiap elemen masyarakat. Untuk mengetahui hasil riil dari

penyajian laporan keuangan itu sendiri diperoleh dengan melihat pengaruhnya pada *Good Corporate Governancetersebut*.

Maka dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis yaitu :

H₅ : *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Operasionalisasi Variabel.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel yaitu :

a. Variabel bebas.

Yaitu Good Corporate Governance , yang dilambangkan dengan Variabel X. Adapun indikator yang digunakan adalah : 1). Akuntabilitas, 2). Transparansi, 3). Responsibilitas, dan 4). Perlakuan yang setara.

b. Variabel terikat.

Yaitu kualitas Laporan Keuangan, yang dilambangkan dengan Variabel Y.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah proses penentuan suatu ukuran variabel. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Setelah mengetahui landasan teori dari masing-masing variabel, maka definisi operasional penelitian ini disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Alat Ukur	Skala
Variabel X ₁ Akuntabilitas. Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. (Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010)	Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum. Akuntabilitas Proses Akuntabilitas	Penghindaran penyalahgunaan jabatan (<i>abuse of power</i>) serta adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik Prosedur-prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya. Untuk pertimbangan	Kuisisioner	Ordinal

	program	apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, dan apakah ada alternatif program yang lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal.		
	Akuntabilitas Kebijakan.	Pertanggung jawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.		
Variabel X2 Transparansi Transparansi adalah: memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan	Komunikasi publik oleh pemerintah Aksesibilitas masyarakat terhadap transparansi dalam pembuatan laporan keuangan.	Laporan keuangan mudah di akses. Terbukanya informasi mengenai proses dan kebijakan dalam laporan keuangan Sistem pemberian informasi kepada publik. Laporan pertanggungjawaban tepat waktu. Dokumen laporan keuangan mudah diakses.	Kuisisioner	Ordinal

<p>menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010).</p>				
<p>Variabel X3 Responsibilitas Responsibilitas adalah prinsip dimana para pengelola wajib memberikan pertanggung jawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan</p>	<p>Dimensi Hukum Dimensi Moral Dimensi Sosial Dimensi Spritual</p>	<p>Bentuk ketaatan kepada hukum dan peraturan yang berlaku Bentuk keadilan bagi semua pemangku kepentingan Bentuk pemberian CSR oleh Pemerintah Daerah Bentuk aktualisasi diri</p>	<p>kuisisioner</p>	<p>Ordinal</p>

kepadanya				
Variabel X4 Perlakuan Setara perlakuan yang setara merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara	Keseimbangan antara hak dan kewajiban Informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan Pemberian pendapat yang bebas	Jelasnya tanggung jawab dan wewenang pihak yang terkait Keterbukaan informasi yang penting Rutinnya pertemuan dalam pengumpulan pendapat dari pemangku kepentingan	kuisisioner	Ordinal
Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 Paragraf sebagaimana terdapat di peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa laporan	Relevan Andal Dapat dibandingkan	Memiliki manfaat timbal balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap. Tidak mengandung informasi yang menyesatkan dan kesalahan material, penyajian jujur, serta dapat diverifikasi. Dapat dibandingkan dengan periode	Kuisisioner	Ordinal

keangan merupakan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.	Dapat dipahami	sebelumnya. Mengandung pengetahuan yang memadai.		
--	----------------	---	--	--

Skala pengukuran yang digunakan dalam data ini adalah Skala Ordinal.

Skala Ordinal merupakan perbandingan antar kategori dimana masing-masing kategori diberi bobot nilai yang berbeda. Skala Ordinal selain menyatakan kategori, juga menyatakan peringkat.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, beserta jalan dan kotanya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang karena Badan tersebut yang mengelola keuangan dan menyusun anggaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang secara keseluruhan sehingga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mampu menggambarkan Good Corporate Governance Pemerintah Daerah tersebut. Lokasi BPKAD ini beralamat di Jalan Mawar No.8 Lubuk Pakam.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono: **Populasi sendiri merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakter tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.**²²

Adapun populasi dalam penelitian adalah semua pegawai negeri sipil yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang yang berjumlah 59. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*,

Menurut Sugiyono mengatakan bahwa: **Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel.**²³

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dipercaya kepada responden yang memang dianggap mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang *Good Corporate Governance* terhadap kualitas laporan keuangan serta dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai tujuan dan masalah penelitian.

Pada penelitian ini, kriteria yang digunakan sebagai pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Menduduki jabatan kepala dinas, sekretaris dinas, kasubag keuangan, kepala bidang, dan bendahara di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
2. Masa kerja minimal selama satu tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

²²Sugiyono. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Edisi Baru: Alfabeta. Bandung. 2016. Hal.80

²³Sugiyono. *Op.Cit.*, Hal. 85

3. Individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Maka jumlah responden yang dapat dijadikan sampel dan yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dalam pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3.2
Jumlah Responden

No	Nama Instansi	Jumlah (Orang)
1	Kepala BPKAD	1
2	Sekretaris BPKAD	1
3	Kepala Bidang Pembendaharaan	1
4	Kepala Sub Bidang Kas Daerah	3
5	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	1
6	Kepala Sub Bidang Pembukuan	1
7	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan	3
8	Kepala Bidang Anggaran	3
9	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	2
10	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	2
11	Kepala Bidang Aset	1
12	Kepala Sub Bidang Gaji Pegawai	1
13	Kepala Sub Bagian Keuangan	1
14	Bendahara PKD dan Pengeluaran	1
15	Kepala Sub Bagian Program	1

16	Kepala Sub Bagian Umum	1
17	Bendahara Khusus Bupati dan Wakil Bupati	6
	Jumlah	30

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Deli Serdang

Jadi jumlah responden ada 30 orang. Kuesioner akan diberikan langsung kepada responden, kemudian akan diterima kembali pada waktu yang disepakati dengan responden.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan deskriptif kuantitatif. Artinya data yang dikumpulkan berupa Angka-angka yang berasal dari naskah kuisisioner. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Primer, dengan cara: kuesioner

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik menggunakan media angket (kuisisioner) terhadap para pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Narbuko Cholid et.al,

Metode Kuisisioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Untuk memperoleh data, angket disebarakan kepada responden (orang-orang yang menjawab jadi yang diselidiki) terutama pada penelitian survei.²⁴

Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Skala pengukuran kuisisioner yang digunakan dalam data ini adalah Skala Likert. Menurut Sugiyono **“Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”**.²⁵

Setiap item dari masing-masing variabel dijadikan dasar untuk pembuatan kuisisioner dimana jawaban diberi skor sebagai berikut:

1. Sangat Tidak Setuju (STS) = diberi skor 1
2. Tidak Setuju (TS) = diberi skor 2
3. Netral (N) = diberi skor 3
4. Setuju (S) = diberi skor 4
5. Sangat Setuju (SS) = diberi skor 5

Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang penerapan GCG terhadap kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang yaitu dengan cara wawancara langsung kepada 30 responden.

2. Data sekunder, Studi Kepustakaan (Library Research)

²⁴Narbuko Cholid et.al, **Metode Penelitian**, Cetakan Kesebelas: PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2010, Hal.76

²⁵ Sugiyono, **Op.Cit.**, Hal.93.

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa struktur organisasi dan uraian tugas. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui kuisisioner terhadap keseluruhan elemen manajemen pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Uji Kualitas Data

3.6.1.1 Uji Reliabilitas

Reliabilitas pengukuran dibuktikan dengan konsistensi. Konsistensi menunjukkan seberapa baik item-item pertanyaan digunakan untuk mengukur konstruk atau variabel. Menurut Adler Haymans Manurung **“Reliabilitas menyangkut alat ukur yang dipergunakan peneliti dan seberapa tepat alat ukur tersebut menyatakan data yang dikumpulkan”**.²⁶

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Ukuran reliabilitas pada umumnya dapat dilihat berdasarkan *Alfa Cronbach*. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Alfa Cronbach* semakin dekat *Alfa Cronbach* dengan 0,6 semakin tinggi

²⁶Adler Haymans Manurung. **Metode Penelitian Keuangan, Investasi, dan Akuntansi Empirik**, Cetakan Pertama : STIEP Press. Jakarta. 2011.Hal. 38.

reliabilitasnya. Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik sedangkan diatas 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik.

3.6.1.2 Uji Validitas

Menurut Sugiyono : **“Uji validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti”**.²⁷Valid berarti instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan kesesuaian sebuah pengukur data dengan apa yang akan diukur. Biasanya digunakan dengan menghitung korelasi antara setiap skor item instrumen.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

3.6.2.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas berguna untuk mengetahui apakah pada model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen. Mengukur multikolinieritas dapat diketahui dari nilai VIF (*variance Inflation Faktor*) dari model penelitian, jika nilai VIF lebih kecil dari 10 dari nilai *Tolerance* di atas 0,1 maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas anatar variabel independen

3.6.2.2 Uji Heterokedastisitas

²⁷Sugiyono, **Op.,Cit**, Hal.267,

Uji heterokedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidak samaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut heterokedastisitas. Deteksi heterokedastisitas dapat dilakukan dengan metode *scatterplot* dengan memplotkan *ZPRED* (nilai prediksi) dengan *SRESID* (nilai residualnya) . model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpulkan ke tengah, menyempit kemudian lebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit.

3.6.2.3 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Deteksi normal dilakukan dengan penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan :

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.6.3 Uji Hipotesis

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel

dependen). Oleh karena itu peneliti menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut. Pengelolaan data akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi SPSS. Formulasi yang digunakan adalah :

$$Y = A + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Di mana : Y = Kualitas Laporan Keuangan

X1 = akuntabilitas

X2 = transparansi

X3 = tanggung jawab

X4 = perlakuan yang setara (*fairness*)

A = konstanta

b₁, b₂, b₃, b₄, b₅ = koefisien regresi

e = faktor pengganggu (Error)

Persamaan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan tingkat signifikansi 5 % ($\alpha = 0.05$).

3.6.3.1 Uji Signifikan Parsial (Uji -t)

Uji statistik T digunakan pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pada penelitian ini digunakan untuk menguji akuntabilitas dan transparansi secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.

Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada

nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi $< \alpha$, maka hipotesis diterima, begitu pula sebaliknya.

3.6.3.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Untuk menguji hipotesis ke tiga (H3) pada penelitian ini digunakan uji statistik F yang pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable independen yang dimasukkan kedalam formulasi regresi berganda mempunyai pengaruh secara bersama–sama terhadap variabel dependen.

Pada penelitian ini digunakan untuk menguji standar akuntansi pemerintahan, akuntabilitas dan transparansi secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0.05 , maka hipotesis diterima begitupun sebaliknya.

3.6.3.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai Adjusted R Square (*Adjusted R²*) untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, dan perlakuan yang setara mempengaruhi variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 bernilai besar

(mendekati 1) berarti variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika *Adjusted R²* bernilai kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.